

ANARKI ARSITEKTUR

Maria Adriani¹

Dosen Jurusan Arsitektur, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Abstrak

Tulisan ini bermaksud menawarkan kemungkinan keluarnya arsitektur dari sistem-sistem yang mengikatnya, dengan cara mendedahkan sistem-sistem yang bekerja pada arsitektur. Dalam pemahaman umum, arsitektur sebagai ilmu dan praktik yang “eksklusif”, namun sejatinya berhubungan erat dengan dunia sosial, dan oleh karena itu rentan menjadi alat penindasan. Fokus pada(praktik) arsitektur di Indonesia, diskusi diranahkan dalam relung produksi ruang, kuasa pengetahuan dan produksi gagasan. Dalam konteks dimana arsitektur berada dalam zona nyaman dan tanpa kritik selama hampir 30 tahun, tulisan ini sekaligus membuka arogansi terstruktur arsitektur, yang betambat pada pertanyaan dalam rangka tujuan apa (praktik) arsitektur di Indonesia didedikasikan.

Kata Kunci: Anarki, Arsitektur, Indonesia

Abstract

This paper is offering possibilities for architecture to leave from the systems that bind it by uncovering these systems that work on architecture. In general understanding, architecture is seen as an “exclusive” science and practices yet in fact it closely related to the social world, and therefore susceptible to be a repressive tool. By focusing on architectural practices in Indonesia, this discussion is placed in the sphere of spatial production, scientific power and idea production. In the contexts where architecture has been in the comfort zone without criticism for almost 30 years, this paper opens the structured-arrogance of architecture which ties into the question of to what objective goals of architectural practices are dedicated.

Key words: Anarchy, architecture, Indonesia

Author correspondence

Email:

Available online at <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jlb>

PENDAHULUAN

Baru-baru ini, pada Oktober 2018, di Jakarta atau lebih tepatnya di Bintaro², berlangsung pameran arsitektur secara “sporadis” yang terjadi di biro-biro arsitek di kawasan tersebut. Pameran-pameran yang mempresentasikan karya masing-masing ‘*starchitect*’ dan penyedia jasa desain, lengkap dengan *open house*, *ngopi* bareng, dan disuguhi ‘tontonan’ yang canggih³, disambut ramai bak konser K-pop oleh para fans masing-masing biro⁴. Pameran ini didanai “gotong royong” oleh para presenternya, berkiblat ke London dan Milan yang menyelenggarakan pameran karya desain serupa⁵. Bahkan beberapa di antara presenter merogoh kocek lebih dalam untuk merubah tampilan depan biro atau *cafe* mereka, sebagai penanda tempat; agar mudah dikenali di antara kompleks perumahan. Pujian berdatangan, termasuk kepada lingkungan kawasan tersebut:

“Suasana kompleks itu benar-benar ‘nirwana’ bagi orang kreatif. Tidak hanya layout kompleks saja, orang-orangnya juga ‘ramah’ dan semua membawa ‘aura positif’ lalu ditunjang juga dengan susunan pohon yang amat natural tapi terasa sekali bahwa lingkungannya pun ‘kreatif.’” (catatan Jo Adiyanto⁶)

Tampil pada sebuah kawasan perumahan terencana⁷ setahun setelah UU (Undang-Undang) Arsitek disahkan, satu hal yang hilang dari pameran ini, yang persis sama seperti pameran-pameran arsitektur sebelum-sebelumnya adalah ketika YB. Mangunwijaya diundang menanggapi pameran AMI di tahun 1990⁸. Bahwa, tidak kelihatan desain yang serius mengangkat masalah kemiskinan kota⁹.



Gambar 1: Kasus penggusuran biasanya diawali dengan penilaian “kumuh” melalui serangkaian standar visual yang sebenarnya arsitektural. Foto: <http://mediatataruang.com>

“Pekot Luncurkan Surat Penggusuran, Warga Tamansari Bandung Sebut Ada Pelanggaran HAM”, 8 Agustus 2018 (diakses 15 Oktober 2018).

Pertanyaan Romo Mangun masih relevan untuk dipertanyakan ulang hari ini, bukan hanya karena pameran mengambil lokasi pada lingkungan dengan nuansa steril dari kemiskinan, tetapi juga karena absennya pemikiran serius mengenai pertanyaan tersebut

selama tiga dasawarsa terakhir. Pertanyaan ini walaupun beberapa arsitek telah mencoba menjawab, namun jawaban itu berhenti di batas wacana¹⁰. Pertanyaan ini lebih serius lagi untuk dipertanyakan ulang dalam konteks sekarang ketika arsitek(tur) lebih sering digunakan sebagai sterilisator dari kemiskinan. Sementara, pada kasus-kasus (pe)miskinan kota baru-baru ini, alasan arsitektur(al) semacam keindahan, utilitas, dan efisiensi program (rancang kota) justru sering dibunyikan¹¹. Seringnya, kasus-kasus yang demikian dibahas dari persoalan hak kota, sementara nalar arsitektur yang bekerja dibaliknya melenggang heroik¹². Mengapa setelah sekitar 30 tahun berlalu, arsitektur Indonesia belum dapat menjawab secara serius kemiskinan kota?

INDUSTRI JASA PRODUKSI RUANG

Arsitektur secara praktis dapat diartikan sebagai ilmu membangun bangunan. Namun demikian, sejak Vitruvius meletakkan arsitektur dalam ranah produksi pengetahuan, terdapat perbedaan antara yang disebut sebagai karya arsitektur dan bangunan (non-arsitektur)¹³. Melampaui bangunan, karya arsitektur adalah permainan representasi¹⁴. Ia adalah hasil sublimasi fungsi, konstruksi, dan estetika yang diproduksi dalam ranah sosial, politik, budaya yang bersinggungan erat dengan si arsitek yang juga berada dalam kontestasi para pemegang kepentingan. Kontestasi ranah dan modalitas ini membuat arsitektur lebih sering dekat dengan elit penguasa. Arsitek dekat dengan pemimpin spiritual sejak Yunani, Kaisar sejak Romawi, dan pedagang sejak era Marcopolo. Namun karena karya arsitektur hadir dalam ruang nyata, representasi karya arsitektur dapat berdaya gugah dan merubah realitas. Sebuah gedung tinggi dapat menyingkirkan pedagang asongan, menyeleksi siapa saja yang dapat berjalan di sekitarnya, mengatur kecepatan perubahan wajah-kota pada area di sekitarnya, dan sebagainya. Representasi atau citra inilah yang melampaui trilogi fungsi-struktur-bentuk itu sendiri. Muatan politis “citra” inilah yang digaribawahi Romo Mangun, yang membaca kelemahan sekaligus potensi arsitektur¹⁵.

Karena sifat dualisme arsitektur ini, maka banyak yang kemudian menganggap arsitek sebagai agensi menjadi penting¹⁶. Kegelisian inilah yang kemudian dikontrol dengan seperangkat alat etis berarsitektur, dimulai sejak RIBA (Royal Institute British Architects) didirikan¹⁷. Berada dalam konteks kapitalisasi ruang sebagai efek berjalannya revolusi industri abad ke-19 kala itu, RIBA mengatur lingkup dan etika kerja, dan dengan demikian meletakkan arsitek dalam posisi buruh terdidik (white color workers). Misalnya, ketika arsitek mendapatkan “pekerjaan” oleh karena (dari) klien, hubungan mereka dalam praktik sosialnya otomatis berhirarki. Pada hubungan yang berhirarki, sebenarnya akumulasi modal (baca: kekuasaan) berada pada pihak yang lebih tinggi.

Pada era di mana setiap jengkal tanah menjadi bernilai ekonomi, kuasa pemegang kepentingan menjadi lebih absolut dibandingkan arsitek¹⁸. Arsitektur semakin tampil sebagai alat elit penguasa untuk mempropagandakan, mengatur, dan mengeksklusi pihak-pihak yang dianggap tidak membantu kepentingan penguasa. Ketika kuasa produksi ruang arsitektur direduksi oleh kepentingan-kepentingan pemodal, mekanisme produksi karya arsitektur juga direduksi sebagai imbas dari nalar kapitalisme yang berjalan. Sejak masa *frontierism*¹⁹ pekerjaan arsitektur dipecah-pecah menjadi serangkaian kerja-kerja kecil yang dipilah menjadi kerja (buruh) kasar dan terdidik²⁰.

Yang paling terlihat, adalah masa pembangunan kota-kota baru di koloni, termasuk di Hindia Belanda. Lokasi-lokasi bangunan yang didesain oleh Karsten dan Semarang, atau Schumaker di Bandung yang pula permintaan pemerintah kolonial bersifat “*babad alas*” ruang-ruang yang dianggap kosong²¹. Sebagai akibatnya, jasa orang lokal sebagai

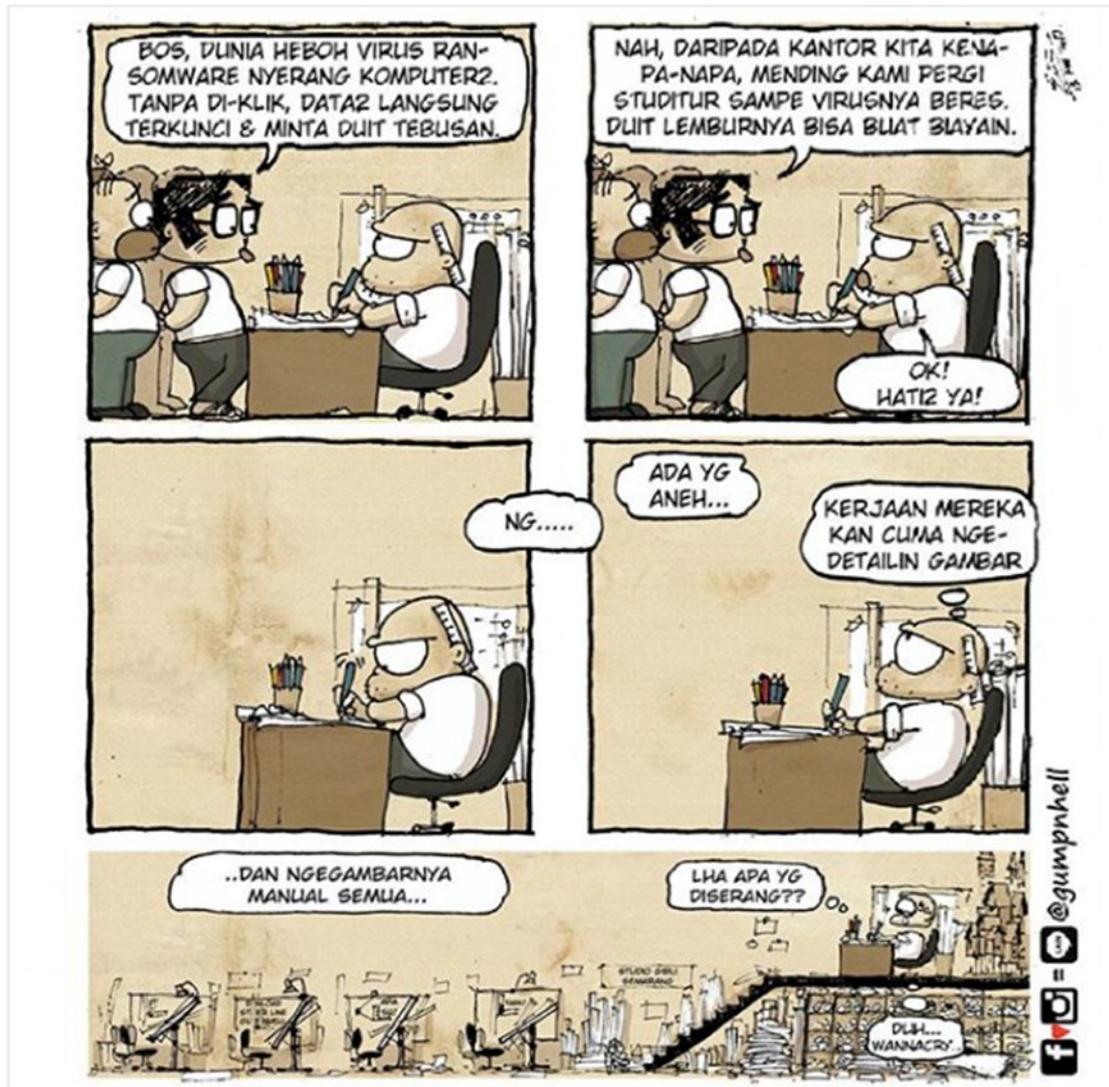
informan pengetahuan arsitektur lokal apalagi tukang yang dianggap buruh kasar, tidak dipertimbangkan dalam elit pikir kolonial. Pada masa itulah sebenarnya, arsitektur lokal diposisikan lebih rendah daripada arsitektur “milik” kolonial, dan ketukangan “hilang” dari praktik arsitektur (modern)²². Sebagai catatan, pada masa ini pula arsitektur lokal mengalami reduksi besar-besaran sebatas yang bisa dinalar dan dipahami oleh arsitek-arsitek dari pemerintah kolonial yang dianggap memiliki ilmu lebih tinggi dalam membangun bangunan²³.



Gambar 2: Hotel dan Apartemen Utara di Jalan Kaliurang, Yogyakarta saat dan paska pembangunan (kiri ke kanan). Kepentingan pemilik modal jauh lebih penting yang menisbikan warga dan permasalahan kesulitan air yang timbul nyata sebagai dampak pembangunan. Apakah kasus ini semata persoalan etika? Diunduh dari <http://advokatugm.wordpress.com> (kiri) dan <http://gites.fr> (kanan), sebuah situs real estate di Prancis pada tanggal 15 Oktober 2018.

Sejak modernitas berjalan dan klasifikasi kerja arsitektur diaplikasikan pada proses konstruksi, arsitek (ber)pisah dari realitas (lahan, konteks, bangunan) yang dibangunnya²⁴. Pada masa ketika kepentingan global butuh dilancarkan oleh infrastruktur untuk menyerap sumber daya dan bersaing dalam pasar, formalisasi profesi berjalan beriringan dengan industrialisasi sistem membangun. Di lapangan, terdapat sistem kuasa kontraktor dan developer yang berjalan beriringan. Jasa kontraktor dan developer adalah industri berbasis buruh kasar dan jaringan kronik industri pembangunan. Sebagai industri, developer dan kontraktor terikat dengan jumlah dan kecepatan produksi.

Selain itu, arsitek juga terikat dengan hirarki kerja arsitektur meretas pula lintas geografi, dari zaman ke zaman melalui sistem kerja biro arsitektur. Sebuah biro dipimpin arsitek kepala, di mana terdapat pula arsitek-arsitek partner, junior, *drafter* (juru gambar), juru presentasi dan animasi, kelompok manajemen²⁵. Hubungan kerja disusun hirarkis, di mana arsitek kepala mutlak menentukan arah. Kebalikan dalam relasinya dengan klien, relasi dalam biro tidak pernah dibayangkan setara²⁶. Seorang lulusan arsitektur akan memulai kerjanya sebagai seorang *drafter*, bertanggung jawab pada arsitek junior dan kemudian arsitek kepala. Hirarki semacam ini hampir pasti bersifat stabil, sebelum arsitek kepala menunjuk penggantinya, atau “staff” memutuskan keluar. Arsitek menjadi otak dan jantung dalam biro yang berada dalam tarik-menarik antara pemegang kepentingan, kontraktor, dan developer.



Gambar 3: Ilustrasi hirarki kerja pada biro arsitektur.

Komik strip gumpnhell tertanggal 17 Mei 2017, digambar oleh Errik Irwan, diunduh seijin kreator tanggal 30 Oktober 2018

Dalam hubungan “bernama” proyek arsitektur, modalitas ekonomi lebih kuat dibandingkan modalitas pengetahuan yang dimiliki arsitek. Sebaliknya, dalam hubungan yang didasari kepentingan berbagi pengetahuan misalnya, modalitas pengetahuan tentu lebih kuat. Apabila produksi ilmu pengetahuan pada era Vitruvius menjamin eksklusifitas (bangunan) arsitektur dengan kerangka hirarki-kapitalistik²⁷, pada etika profesionalisme ini arsitek sebenarnya diposisikan sebagai subordinan dari pemegang kepentingan (klien). Profesionalitas dan integritas semacam ini pula yang tampil dalam UU Arsitek di Indonesia.

YANG HILANG DARI ARSITEKTUR DI INDONESIA

Berada dalam tarik-menarik kepentingan pemodal, etika profesionalisme arsitek hanya mengatur hubungan antara pihak perencana-pembangun dan klien. Di sisi lain, sebagai ilmu modern yang masuk bersamaan dengan konteks politik etis, arsitektur menyerap semangat untuk membangun²⁸. Dalam narasi pembangunan, arsitektur beserta ilmu-ilmu lain digunakan memfasilitasi visi yang dibayangkan penguasa. Sementara, terdapat titik

lemah dalam narasi pembangunan terutama di Indonesia. Narasi pembangunan di Indonesia didasarkan pada kehendak memperbaiki, yang berarti meletakkan realitas pada kategori ‘masalah’. Subordinasi realitas ini juga didukung dengan pandangan *top-down* yang umum digunakan untuk menghilangkan perspektif sosial dalam pendekatannya²⁹.

Narasi pembangunan dalam arsitektur ini berlangsung menyebar sejak pemerintah kolonial yang melihat bahwa menanam modal kultural di tanah jajahannya menguntungkan secara ekonomis dan politis. Pada sekitar tahun 1918 kurang lebih sebelum dibangunnya T.H. Bandung, *enclave-enclave* kota-kota “tiruan” di Belanda dibangun di daerah-daerah berlereng tidak jauh dari kota “asli” pusat perekonomian. Kota-kota tersebut; Salatiga, Bogor, dan *enclave-enclave* seperti Menteng, Depok dibangun bukan hanya dalam keinginan untuk “kembali ke rumah (di Belanda)”, tetapi juga untuk mensterilisasi diri dari kampung yang penuh kuman³⁰. Batas-batas dikenakan untuk pertama kali di antara pekarangan dan kampung, gerbang, pagar, dan jalan-jalan³¹. Paradigma untuk berada di dalam batas ini, merembes juga dalam produksi pengetahuan arsitektur³² melalui reproduksi paradigma dan preseden, melalui pendidikan dan publikasi.

Dalam kerangka menuju pembangunan, wacana pengetahuan arsitektur di Indonesia terbatas dalam tiga area saja; etis, identitas, dan teknis. Ketiganya bersumber dari kekhawatiran produktivitas pemenuhan peran arsitektur dalam narasi besar pembangunan³³. Setelah aspek etika berada dalam ruang vakum hubungan arsitek dan pemilik modal, pada dunia akademik, etika arsitektur di kerangkai dengan nama keberlanjutan lingkungan. Berbagai “wajah” dan bentuk etika hijau digali bersama. Hampir pasti, dorongan berbuat baik terhadap lingkungan menjadi latar belakang yang tampil pada setiap kata pengantar dan pendahuluan buku-buku dan jurnal-jurnal.



Gambar 4: Tanaman Lee Kuan Yew yang sering dipakai untuk menghijaukan tampilan arsitektur secara instan. Alih-alih hijau, tanaman mutan ini ekspansif menghabiskan hara tanah dan air. Gambar diunduh dari bukalahap.com 30 Oktober 2018.

Berbagai macam metode, teknik, konsep dan nuansa etika hijau arsitektur tersebut dieksplorasi pada ruang vakum yang lain. Wacana kelokalan dibekukan dalam wadah fisik material bangunan tanpa menelisik geografi produksi materialnya. Wacana *revivalisme* - kebangkitan arsitektur- dibaca dalam kerangka waktu yang lampau tanpa memperhatikan sistematika produksi ruang yang jauh berbeda dengan keadaan era “nusantara”. Wacana lingkungan diletakkan dalam kerangka tampilan visual, tanpa memahami reproduksi pengetahuan yang terlanjur dipangkas revolusi hijau.

Bambu dan beragam macam teknik mengolah dan merakitnya, adalah contoh primadona yang sering tampil dalam bahasan etika hijau ini. Bambu dianggap mewakili kelokalan, kebangkitan arsitektur, dan lingkungan sekaligus. Faktanya, wacana bambu hijau di Bali menghabisi hutan bambu di Jawa Tengah. Kebutuhan akan bambu berstandar internasional, didukung dengan infrastruktur yang memudahkan pemodal besar masuk dalam tatanan desa, menyeleksi kualitas bambu dengan sistem panen massal. Satu bambu dihasilkan dari pemotongan satu rumpun bambu. Kebutuhan bambu untuk etika arsitektur hijau tidak pernah dilihat imbang dengan posisi bambu sebagai material murah masyarakat kebanyakan, sistem tebang-tunggu yang membudaya di kalangan masyarakat desa, termasuk peran bambu dalam membatasi aliran air dan uang.

Jika praktik arsitektur tidak pernah melihat dampak sosial dari sebuah pilihan tindakannya³⁴, produksi pengetahuan etika hijau absen melihat dimensi ekonomi-politik dari sebuah gagasan. Dari sejarahnya, keberlanjutan-lingkungan tumbuh dari kekhawatiran runtuhnya tatanan-dunia paska perang dingin. Pemangkasan salah satu ideologi yang kuat pada masa itu turut melemahkan ekonomi, sehingga penciptaan tatanan produksi-distribusi-konsumsi baru perlu diciptakan³⁵. Narasi besar *sustainability* menguntungkan lokus-lokus pencetus kota kreatif, karena memindahkan produksi yang kotor dan segala tanggung jawabnya kepada negara-negara dunia ketiga³⁶.

Absennya pemikiran kritis juga menyeruak pada lebih banyaknya publikasi bersifat "how to". Publikasi teknis semacam ini ada dalam lanskap buku akademik dan komersial. Dalam narasi pembangunan, publikasi "how to" dianggap lebih produktif. Sebuah cara akan dibedah, serupa seperti narasi ketokohan, bersifat preseden dan paradigma mengandaikan proses sintesis selalu dan hanya berasal dari proses analisis mekanis. Sebenarnya, produksi pengetahuan praksis semacam ini meletakkan arsitek secara absolut sebagai pemilik legalitas pengetahuan membangun. Biasanya, masyarakat setempat dihadapkan dua pilihan, dikte dan "pencurian" ilmu. Disebut pencurian karena masyarakat tidak dilibatkan dalam reproduksi keilmuan. Ilmu yang pada awalnya hadir dalam keseharian masyarakat, diangkat menjadi eksklusif, sementara masyarakat setempat tidak mendapatkan hasil apapun. Kasus semacam ini juga hadir dalam cara-cara yang melibatkan masyarakat.

Terakhir, absensi pemikiran kritis ini membawa produksi pengetahuan arsitektur di Indonesia dalam tarikan kontestasi identitas beriringan pengaruh globalisasi. Meneruskan nalar Orde Baru, identitas menjadi kata kunci eksplorasi ilmiah ilmu arsitektur pada Indonesia kontemporer. Identitas, entah itu keindonesiaan, kelokalan, maupun representasi kelompok tertentu diperlawankan dengan globalisasi yang muncul sebagai kekuatan budaya saja. Padahal, globalisasi adalah tentang kuasa dan akses ekonomi yang menyaru lewat simbol-simbol identitas yang disematkan. Identitas hijau, identitas agama, identitas kelokalan, maupun identitas keindonesiaan. Sehingga, dapat dipastikan diskursus arsitektur di Indonesia lebih banyak bersifat konseptual, praksis, atau retorik.

Pemangkasan produksi pengetahuan arsitektur ini selain merupakan warisan dari narasi pembangunan yang akut, juga berhubungan dengan budaya politik Indonesia. Melalui mekanisme studi kasus, studio pada perkuliahan, pengetahuan arsitektur di Indonesia menyandarkan keilmuannya pada retasan pengetahuan yang dimiliki "bapak" arsitektur³⁷. Itupun, dalam batasan kasus-kasus yang dipelajari dalam kerangka pemenuhan fungsi bangunan tertentu. "Bapak" yang berdasarkan keilmuan dan pengalamannya ini tidak lepas dari kepentingan pribadi. Kritik metode preseden dan paradigma ini telah dilontarkan sejak 1980an dalam lanskap produksi pengetahuan arsitektur secara umum. Namun, di Indonesia "bapak-bapak" yang memiliki pengikut-pengikutnya yang hampir

fanatik, memperparah proses transfusi ilmu tersebut.

ANARKI DAN PRODUKSI GAGASAN

Kembali ke pertanyaan Romo Mangun di awal, sebenarnya, “pertanyaan” kontribusi arsitektur pada masalah kemiskinan kota, tersebut mengandung paradoks jika disandingkan *vis a vis* dengan praktiknya di Code. Praktik di Code, bukan semata praktik arsitektur, walaupun kemudian mendapat penghargaan arsitektur³⁸. Praktik tersebut adalah jaringan integral –bukan hanya bekerja sama- dari individu-individu yang berusaha memanusiaikan manusia yang berangkat dari dasar kemampuan (pikir, sumber daya, energi) yang beragam³⁹. Dengan kata lain, semua yang terlibat dalam praktik Code menjadi penentu produksi ruang sekaligus produksi pengetahuan, termasuk masyarakatnya. Perbedaan dengan “barefoot architect” adalah pada posisi arsitek yang dianggap sebagai agen “menolong” masyarakat. Pada praktik Code, posisi agen yang hirarkis, tidak ada. Arsitektur (dan ilmu-ilmu lainnya) menjadi bahasa yang menjembatani relasi individu-individu terlibat, “kelompok” Code dengan pemerintah dan kelompok yang lebih luas, realitas dan realitas lain.

Jadi, pertanyaan tentang “desain” tidak sebaiknya dimaknai sebagai pertanyaan tertutup. Misalnya, dengan menuduh etika arsitektur sebagai biang kerok, atau terlalu larut mengangkat soalan identitas yang justru membuat mandeg reproduksi pengetahuan. Menelusuri pertanyaan tidak terlihatnya desain yang serius mengangkat permasalahan kemiskinan kota, sebenarnya pula menelusuri konstruksi gagasan yang berjalan sistemik di dalam tubuh arsitektur sendiri.

Oleh karena praktik arsitektur dekat dan tersekat oleh kekuasaan, nalar kapitalis pada arsitektur melanggengkan menara gading pengetahuan, formalisasi elit profesi arsitektur dan sistem membangun, arsitek perlu keluar dari cara berpikir hirarkis ini. Terlebih, ketika watak dominan kapitalistik menyeleksi secara eksklusif manusia, lahan, wilayah kerja, area pengetahuan, program dan tujuan berarsitektur. Hubungan-hubungan di dalam praktik arsitektur ditabulasikan berdasarkan prioritas dan tidak bisa menyampaikan produksi gagasan secara utuh. Padahal, kemerdekaan produksi gagasan inilah yang menjembatani visi arsitek-arsitek dengan realitas⁴⁰.

Dengan produksi gagasan yang direnggut, atas nama negosiasi, arsitek dapat menisbikan subyek dan aspek yang muncul banyak dan beragam di ranah praktik dan produksi pengetahuan. Arsitektur bukannya membebaskan, tetapi justru menekan. Yang paling banyak ditemui adalah menekan masyarakat umum. Proyek “peremajaan”, “perbaikan” kampung adalah ladang subur bagi arsitek untuk memerdekakan kebebasannya mendesain, memproduksi gagasan. Tetapi bukan memerdekakan masyarakat kampung. Kemudian, seperti lingkaran, etika arsitektur diangkat untuk mengalihkan tanggung-jawab permasalahan sistemik ini kepada orang-perorangan (arsitek). Demikianlah sebenarnya lingkup produksi ruang dalam arsitektur secara sistemik direduksi kemerdekaannya, kecuali arsitek berani keluar dari nalar kapital terutama dalam relasinya dengan pemegang kepentingan.

Anarki yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah untuk keluar dari watak arsitektur yang hirarkis dan kapitalis. Yang juga berarti membalik logika-logika sistem berarsitektur. Berbeda dari dekonstruksi arsitektur yang berkuat pada desain, anarki arsitektur membongkar sistem-sistem yang bekerja di ranah produksi gagasan, produksi pengetahuan, dan produksi ruang dalam arsitektur dalam kerangka kesetaraan-kemanusiaan. Misalnya, menggugat legasi arsitek sebagai memproduksi ruang dan mengembalikannya pada masyarakat umum, yang sebenarnya sudah menjadi realitas di Indonesia berupa kampung-

kampung⁴¹. Atau dengan membebaskan produksi estetika dari arsitektur kepada tukang-tukang dalam proses konstruksi, karena semua manusia pada dasarnya terpapar oleh estetika yang tumbuh dari habitus dan arena yang dihidupinya masing-masing⁴².



Gambar 5: Kampung warna-warni di Semarang adalah contoh tekanan dengan nalar kapitalis pada warga miskin kota untuk “kemerdekaan” berbagai elit yang terlibat, sekaligus cerminan pendek dan putusnya sumbu pemikiran arsitektur di Indonesia. (diunduh dari <http://bbc.com>, tanggal 3 November 2018)



Gambar 6: Langgar Yu Padi, di Kendeng, Pati produksi ruang, gagasan dan pengetahuan bersama-sama diciptakan dari relasi antara konteks, konstruksi, dan perorangan yang terlibat. (foto : Yoshi Fajar dengan ijin)



Gambar 7: sebuah rumah kos di Depok, detail-detail dan “tempelan” pada dinding-dinding ditemukan sendiri oleh para tukang yang terlibat, yang terinspirasi dari keseharian mereka di desa di pelosok Jawa Barat. Dalam kasus ini, tugas arsitektur adalah memediasi imajinasi estetika pemilik rumah dan imajinasi estetika tukang. (foto: Yoshi Fajar dengan ijin).

Dalam anarki arsitektur, tidak ada perorangan atau grup yang dapat ditunjuk sebagai arsitek, melainkan semua adalah arsitek. Legasi pengetahuan arsitektur juga dibongkar berdasarkan bahwa tidak ada satu pemikiran pun yang dapat mendikte pemikiran lain. Proses sintesis tidak selalu menjadi akibat proses analisis bahasa-bahasa didaktis arsitektur diganti dengan bahasa-bahasa relasi sosial dan kerjasama. Kepentingan produksi diganti dengan dedikasi proses. Peran arsitektur diganti sebagai mediator dalam relasi yang setara. Dalam konteks ketika masyarakat dapat jadi menguasai pemahaman produksi ruang dan pengetahuan melalui dukungan teknologi informasi global, anarki adalah jalan mungkin menembus batas-batas arsitektur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Maria. 2018. “Estetika Kandang Ayam: Di Antara Imajinasi Otoritas dan Anarkisme Kota”, dalam A. Windarto, A. Harimurti, Hugo S. Prabangkara dan Putri Ayu R (ed.). *Kosmopolitanisme Si/Apa: Benedict Anderson, Indonesia & Revolusi Pemuda*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press kerja sama dengan Lembaga Studi Realino.
- Anderson, Benedict. 1990. *Language and Power: exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Anderson, Benedict. 2015. *Di Bawah Tiga Bendera: Anarkisme Global dan Imajinasi Antikolonial*. Serpong: Margin Kiri.
- Budiharjo, Eko. 1983. *Menuju Arsitektur Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Budiharjo, Eko. 2009. “Catatan Pendahuluan” dalam E. Darmawan dan E. Purwanto. *Percikan*

- Pemikiran para 'Begawan': Arsitek Indonesia menghadapi Tantangan Globalisasi*. Bandung: PT. Alumni.
- Frick, Heinz. 1996. *Arsitektur dan Lingkungan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Graham, Robert (ed). 2005. *Anarchism: A documentary history of libertarian Ideas Vol. 1*. Montreal: Black Rose Books.
- Jellinek, L. 1995. *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*. Jakarta: LP3ES dan Sajogyo Institute.
- Khudori, Darwis. 2002. *Menuju Kampung Pemerdekaan: Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya, Belajar dari Romo Mangun di Pinggiran Kali Code*. Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat.
- Kusno Abidin. 2016. *Visual Cultures of the Ethnic Chinese in Indonesia*. New York: Rowman & Littlefield.
- Kusno, Abidin. 2006. *Dibalik Paska Kolonial: Architecture, Urban Space, and Political Cultures in Indonesia*. London, UK: Routledge.
- Kusno, Abidin. 2012. *Zaman Baru Generasi Modernis: Sebuah Catatan Arsitektur*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lang, Jon dan Moleski Walter. 2010. *Functionalism Revisited: Architectural Theory and Practice and The Behavioral Sciences*. New York : Routledge.
- Lee, Tania M. 2012. *The Will to Improve: Perencanaan Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia*. Serpong: Marjin Kiri.
- Magdoff, Fred dan John B. Foster. 2018. *Lingkungan Hidup dan Kapitalisme*. Serpong: Marjin Kiri.
- Mangunwijaya, Yusuf B. 2002. "Rumah Bambu", dalam Yusuf B. Mangunwijaya. *Rumah Bambu Kumpulan Cerpen Pertama dan Terakhir*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mangunwijaya, Yusuf B. 1995. *Wastu Citra*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mrazek, Rudolf. 2002. *Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Murti, Yoshi Fajar Kresno. 2012. *The Pating Tlecek Ruang Arsitektur: Derita Rumah Eko Nugroho dalam Dinamika Kritik Ruang, Rumah dan Arsitektur (Indonesia)*. Yogyakarta: Daging Tumbuh Studio.
- Nas, Peter JM. dan Martin de Vietter (eds). 2009. *Masa Lalu dalam Masa Kini: Arsitektur di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, kerjasama dengan KITLV- Netherland.
- Pratikno, Priyo. 2011. *Etika dan Estetika: Cara-cara Berarsitektur Bijak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia. 2012. *Tegang Bentang: Seratus Tahun Perspektif Arsitektural Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Ranciere. 2011. "The Thinking of Diessensus: Politics and Aesthetics", dalam P. Bowman dan R. Stamp (eds). *Reading Ranciere*. London: Bloomsbury.
- Rowe, Collin. 2014. "Program vs Paradigm", *Cornell Jurnal of Architecture*, No. 2.
- Shiraishi, Saya S. 2001. *Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik*. Jakarta: keputakaan populer Gramedia.
- Snyder, James C. 1979. *The Introduction to Archiecture*. Loncon: John Willey and Sons.
- Sopandi, Setiadi. 2013. *Sejarah Arsitektur: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tanpa Penulis. 2011. "Craftmanship: Within the History of Architecture in Indonesia", *Majalah Archinesia*.
- UU No. 6 2017 Tentang Arsitek
- Widyarta, M Nanda. 2007. *Mencari Arsitektur sebuah Bangsa: Sebuah kisah Indonesia*. Surabaya: Wastu Lanas Grafika.

Internet:

- "Rudetnya Rumah Deret Tamansari Bandung", Frans Ari Prasetyo, pada <http://metaruang.com> (diakses tanggal 13 Oktober 2018)
- Dani Prabowo, "Mimpi Besar Jadikan Bintaro Distrik Kreatif Dunia", kompas.com; Kamis 11 Oktober 2018, diakses 13 Oktober 2018.
- [http:// m.youtube.com/ bintaro design district –opening ceremony @ kopi manyar](http://m.youtube.com/bintaro%20design%20district%20-%20opening%20ceremony%20@%20kopi%20manyar) 11.09.18
- [http:// m.youtube.com/ g-dragon \(who you?\) m/v](http://m.youtube.com/g-dragon%20(who%20you?)%20m/v), masing-masing diakses 13 Oktober 2018.
- [http://m.youtube.com "Halo-halo Bandung"](http://m.youtube.com/Halo-halo%20Bandung) oleh Nafsu Visual (diakses tanggal 13 Oktober 2018)

CATATAN AKHIR

1. Penulis adalah seorang urbanis (peneliti kota), kritikus arsitektur dan urban desain dan dosen di Jurusan Arsitektur, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
2. Bintaro Design District (BDD) Oktober 2018, dilaksanakan di 42 venue yang tersebar di kawasan ini. Berisi pameran 300 karya dari 72 presenter. Lihat kompas.com; Kamis 11 Oktober 2018, "Mimpi Besar Jadikan Bintaro Distrik Kreatif Dunia", liputan Dani Prabowo, diakses 13 Oktober 2018.
3. 18 mesin printer 3D diujarkan sedemikian rupa dan bekerja non-stop mereproduksi 300 karya arsitektur yang dipamerkan.
4. Lihat [http:// m.youtube.com/ bintaro design district –opening ceremony @ kopi manyar](http://m.youtube.com/bintaro-design-district-opening-ceremony-kopi-manyar) 11.09.18 dengan [http:// m.youtube.com/ g-dragon \(who you?\) m/v](http://m.youtube.com/g-dragon-who-you-m/v), masing-masing diakses 13 Oktober 2018.
5. Tersebut, adalah contoh yang disebutkan oleh tim kurator tentang rehabilitasi kawasan yang "ditinggalkan" kemudian "diubah menjadi studio kreatif".
6. Seorang praktisi dan pengajar arsitektur bermukim di Palembang.
7. Bintaro adalah sebuah kawasan perumahan terencana, digagas oleh Ciputra pada lahan yang strategis; dimana Jakarta Design Center dan kantor beberapa perhimpunan ahli desain berada, dan diapit oleh beberapa universitas penyedia lulusan arsitektur.
8. Arsitek Muda Indonesia (AMI). Sebuah komunitas profesi arsitektur di penghujung tatanan Orde Baru, yang menyuarakan "Manifesto" tentang kebebasan mendesain pada pameran "Arsitektur Perspektif" di tahun 1990.
9. Lihat: Abidin Kusno, *Zaman Baru Generasi Modernis: Sebuah Catatan Arsitektur* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hal. 116.
10. Misalnya desain "Rusunawa" Adi Purnomo dan Fredy Setiawan (2002), dan "Kampung Susun" Yu Sing (2016). Lihat pula "ajakan" Antonio Ismael dalam Darmawan E, dan Purwanto E (eds.) 2009, dan Marco Kusumawijaya dalam "Tegang Bentang" PDAI (2002).
11. Misalnya pada kasus Kampung Pulo (Jakarta) dan Kampung Tamansari (Bandung). Liputan video mengenai Kampung Tamansari (Bandung) silakan lihat <http://m.youtube.com> "Halo-halo Bandung" oleh Nafsu Visual (diakses tanggal 13 Oktober 2018), "Rudetnya Rumah Deret Tamansari Bandung", Frans Ari Prasetyo, pada <http://metaruang.com> (diakses tanggal 13 Oktober 2018). Untuk Kampung Pulo (Jakarta), lihat: Maria Adriani, "Estetika Kandang Ayam: Di Antara Imajinasi Otoritas dan Anarkisme Kota", dalam A. Windarto, A. Harimurti, Hugo S. Prabangkara dan Putri Ayu R (ed.), *Kosmopolitanisme Si/Apa: Benedict Anderson, Indonesia & Revolusi Pemuda* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press kerja sama dengan Lembaga Studi Realino, 2018).
12. Misalnya Global Land Forum 2018, konferensi mengangkat masalah perampasan tanah di kota yang justru melakukan perampasan tanah warganya (Tamansari).
13. Lihat James C. Snyder, *The Introduction to Architecture* (Loncon: John Willey and Sons, 1979).
14. Lihat Yusuf B. Mangunwijaya, *Wastu Citra* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995); Setiadi Sopandi, *Sejarah Arsitektur: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
15. Lihat Mangunwijaya, *ibid.* Wastu Citra adalah usulan Mangunwijaya sebagai pengganti kata "arsitektur" yang tidak dalam maknanya. Dalam pengusulan ini, diselipkan pula kegelisahan akan posisi arsitektur secara umum dalam konteks kemanusiaan, juga posisi arsitektur Indonesia dalam berhadapan dengan "ibu" arsitektur dunia. Perkembangan ilmu budaya yang masih meletakkan budaya Indonesia sebagai produk amalgamasi budaya India dan Oriental, namun juga berada dalam tarikan budaya "Barat", ditelusuri juga dipertanyakan oleh Mangunwijaya.
16. Lihat misalnya catatan Eko Budiharjo dalam Eko Budiharjo, "Catatan Pendahuluan" dalam E.

- Darmawan dan E. Purwanto, *Percikan Pemikiran para 'Begawan': Arsitek Indonesia menghadapi Tantangan Globalisasi* (Bandung: PT. Alumni, 2009); lihat pula Kusno, *op. cit.*, yang melakukan investigasi gerakan pemikiran modern yang dilakukan arsitek-arsitek Indonesia. Menarik bagaimana investigasi tersebut membuktikan sebaliknya (seperti dikemukakan oleh Yoshi Fajar pada diskusi peluncuran buku di Yogyakarta, 2012).
17. *Royal Institute British Architects*, didirikan 1834. RIBA adalah organisasi profesi arsitek pertama di dunia, yang juga membentuk ranah dan sistem produksi pengetahuan arsitektur. Asas-asas profesionalisme RIBA banyak ditiru oleh organisasi profesi arsitek di seluruh dunia, termasuk Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
 18. Lihat misalnya Abidin Kusno, *Visual Cultures of the Ethnic Chinese in Indonesia* (New York: Rowman & Littlefield, 2016); Abidin Kusno, *Dibalik Paska Kolonial: Architecture, Urban Space, and Political Cultures in Indonesia* (London, UK: Routledge, 2006). Untuk berturut-turut kuasa elit-politik dan perdagangan, dan catatannya mengenai perumahan dan ruko.
 19. Penaklukan wilayah dengan mengasumsikan absennya masyarakat, lingkungan dan budaya sebelum si penakluk itu hadir. Contoh populer dari frontierism yaitu (film) koboi. Beberapa akademia berpendapat *frontierism* ada pada nalar kolonial, modernisasi, dan juga pada nalar globalisasi masa kini.
 20. Lihat Rudolf Mrazek, *Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002) untuk ilustrasi pada masa kolonial di Indonesia, dan bandingkan dengan UU Arsitek (2017) bab III dan V yang menampilkan hirarki pekerjaan arsitek pada masa kini.
 21. Salah satu yang masih bisa dilacak, yaitu mengenai rancangan Kota Tua (Jakarta) yang benar-benar dibayangkan dibangun di atas lanskap yang datar, jauh dari realitasnya yang kala itu masih hutan dan berawa.
 22. Lihat Mrazek, *op. cit.*, terutama bab II, dan bandingkan dengan catatan Mahatmanto pada "Tegang Bentang" 2012.
 23. Terdapat peran penting bahasa dan translasi yang sering dilewatkan pada wacana arsitektur di Indonesia. Padahal, dalam keadaan negara-bangsa belum terbentuk, ketika bahasa lokal dapat jadi memiliki lebih banyak ekspresi dan siasat, sangat mungkin reduksi informasi berlaku. Untuk bahasa, translasi, dan siasat lihat Benedict Anderson, *Language and Power: exploring Political Cultures in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1990). Sementara itu, kritik tajam (dapat dikategorikan menggunakan perspektif paska-kolonial) mengenai kuasa produksi pengetahuan arsitektur justru ada dalam cerpen "Rumah Bambu", baca Yusuf B. Mangunwijaya, "Rumah Bambu", dalam Yusuf B. Mangunwijaya, *Rumah Bambu Kumpulan Cerpen Pertama dan Terakhir* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002).
 24. Lihat Yoshi Fajar Kresno Murti, *The Pating Tlecek Ruang Arsitektur: Derita Rumah Eko Nugroho dalam Dinamika Kritik Ruang, Rumah dan Arsitektur (Indonesia)* (Yogyakarta: Daging Tumbuh Studio, 2012).
 25. Untuk ilustrasi, lihat misalnya biro Aboday, pada A Indra, R David (2018, 2014).
 26. Kondisi ini juga secara tidak langsung diperkuat dengan konstruksi "bapak" dalam budaya politik di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas dalam ranah produksi gagasan.
 27. Sifat natural arsitektur yang bermuatan kapitalistik disini diakui pula oleh Lang & Moleski (2010). Disitu, arsitektur dipahami sebagai produk pengetahuan yang dihasilkan dari hasrat perluasan teritori dan pemupukan modal (sejak imperium Romawi).
 28. Lihat Saya S. Shiraishi, *Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001); Mrazek, *op. cit.*; Kusno (2006), *op. cit.*
 29. Lihat Tania M. Lee, *The Will to Improve: Perencanaan Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia* (Serpong: Marjin Kiri, 2012).

30. lihat catatan Tillema pada Mrazek, *op. cit.*
31. Jalan-jalan pada umumnya menghubungkan, tetapi catatan Tillema tentang pribumi yang buang air di jalan-jalan bikinan kolonial, mengisyaratkan posisi jalan sebagai batas yang nir tetapi dirasa nyata oleh mereka yang terdampak pembagian kelas. Lihat Mrazek, *ibid.*, Murti dalam Arsuka (ed.) 2014.
32. Berbagai kegelisahan serupa telah banyak mewarnai motivasi kalangan akademika arsitektur. Lihat misalnya Mangunwijaya (1992), Heinz Frick, *Arsitektur dan Lingkungan* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), dll.
33. Lihat misalnya, UU no 6 2017 tentang Arsitek.
34. Pernah disampaikan pula oleh Lang J. dan Moleski W (2010).
35. Cermati urutan perang dingin, resesi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa, sepak terjang anggota-anggota *World Bank*, *IMF* dan PBB, dalam pembentukan narasi keberlanjutan lingkungan.
36. Lihat Fred Magdoff dan John B. Foster, *Lingkungan Hidup dan Kapitalisme* (Serpong: Marjin Kiri, 2018).
37. Lihat misalnya Sopandi, *op. cit.*, Darmawan dan Purwanto (eds.), *op. cit.*
38. Aga Khan Award tahun 1992.
39. Bandingkan Darwis Khudori, *Menuju Kampung Pemerdekaan: Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya, Belajar dari Romo Mangun di Pinggiran Kali Code* (Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat, 2002), yang meletakkan posisi “yang terlibat” dan masyarakat tidak dalam posisi setara.
40. Lihat Kusno (2012), *op. cit.*, hampir seluruh geliat pergerakan arsitektur diawali dari kegundahan untuk mendesain secara merdeka, sesuai dengan “*interest*” masing-masing arsitek. Akan tetapi, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian 2, nalar “bapak” di Indonesia juga turut memasung pergerakan arsitektur.
41. Lihat L. Jellinek, *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta* (Jakarta: LP3ES dan Sajogyo Institute, 1995), kampung kota yang tercipta adalah sisa budaya agraris yang digerus oleh perluasan kota. Dengan demikian, sebenarnya kampung yang dianggap sebagai lokus miskin kota memiliki hak hidup lebih dahulu.
42. Ranciere, “The Thinking of Diessensus: Politics and Aesthetics”, dalam P. Bowman dan R. Stamp (eds), *Reading Ranciere* (London: Bloomsbury, 2011).